

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Menjelang tahun 2018, kondisi geopolitik di Semenanjung Korea dipenuhi oleh eskalasi ketegangan yang semakin kompleks. Korea Utara secara agresif meningkatkan uji coba senjata strategisnya termasuk meluncurkan rudal balistik antarbenua (ICBM) pada akhir 2017 yang mampu mencapai daratan Amerika Serikat. Peningkatan program nuklir dan misil Pyongyang tersebut memperparah *nuclear anxiety* di kawasan serta menantang stabilitas keamanan regional. Bagi Korea Selatan, Kondisi ini menimbulkan dilema aliansi: di satu sisi, Seoul sangat bergantung pada *extended nuclear deterrence* Amerika Serikat, namun di sisi lain ada kekhawatiran akan terlibat ke dalam konflik nuklir yang tidak diinginkan *entrapment* (Sukin, 2024). Dengan kata lain, stabilitas kawasan sangat rentan terhadap dinamika aliansi dan postur pertahanan negara-negara terkait.

Perubahan signifikan terlihat pada doktrin nuklir Korea Utara pasca-2018. Jika sebelumnya Pyongyang berpatokan pada prinsip *no-first-use*, pada September 2022 Majelis rakyat korea utara mengesahkan undang-undang yang melegalkan penggunaan senjata nuklir secara pre-emptif, bahkan terhadap ancaman konvensional non-nuklir (Park, 2025). Kebijakan baru ini mencerminkan pergeseran strategi dari sekedar pencegahan (*deterrence*) menuju *nuclear warfighting*, di mana senjata nuklir dipandang bukan hanya sebagai alat defensif, tetapi juga sebagai instrumen ofensif untuk memenangkan konflik terbatas. Doktrin *first strike* tersebut semakin memperparah lingkungan keamanan di Asia

Timur dan mendorong Korea Selatan menghadapi kebutuhan mendesak untuk memperkuat sistem pertahanannya demi mengimbangi peningkatan ancaman Pyongyang.

Gambar 1. Peta batas korea selatan dan korea utara



Sumber : (WorldAtlas)

Tekanan Eksternal Tersebut Diperburuk Oleh Dinamika Domestik Korea Selatan Yang turut memengaruhi urgensi modernisasi pertahanan. Krisis demografi ditandai penurunan drastis populasi pemuda usia wajib militer membuat struktur angkatan bersenjata yang berbasis jumlah personel besar menjadi tidak berkelanjutan. Misalnya, jumlah pria berusia 20 tahun diproyeksikan anjlok dari sekitar 330 ribu pada 2020 menjadi hanya sekitar 150 ribu pada 2065. Selain itu, meskipun anggaran pertahanan Korea Selatan meningkat secara nominal, proporsinya terhadap total belanja negara justru menurun, menuntut strategi efisiensi dan fokus pada investasi prioritas. Hambatan

lain muncul dari tarik-ulur kepentingan antara sipil dan militer dalam birokrasi pertahanan. Walaupun reformasi kelembagaan pasca-otoritarian telah memperluas peran sipil, militer masih dominan dalam perumusan doktrin dan pengadaan alutsista strategis (Kim, 2022). Faktor-faktor domestik ini menunjukkan bahwa modernisasi pertahanan Korea Selatan merupakan kebutuhan multidimensi yang mencakup aspek teknologi, sumber daya manusia, anggaran, dan kelembagaan.

Sebagai respons terhadap tekanan ancaman Korea Utara dan keterbatasan internal tersebut, Seoul meluncurkan *Defense Reform 2.0* pada tahun 2018 di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Kebijakan ini merupakan kelanjutan dari upaya reformasi pertahanan sebelumnya yang dinilai belum optimal. Fokus utama *Defense Reform 2.0* adalah membangun militer yang lebih ramping namun berteknologi tinggi, dengan target pengurangan jumlah pasukan aktif dari sekitar 600 ribu menjadi hanya 500 ribu personel pada tahun 2022. Program ini juga meliputi restrukturisasi komando gabungan, modernisasi alutsista strategis, serta penguatan sistem pertahanan berlapis seperti *Kill Chain*, *Korea Air and Missile Defense* (KAMD), dan *Korea Massive Punishment and Retaliation* (KMPPR) yang ditujukan khusus untuk menanggulangi ancaman rudal dan nuklir Korea Utara (Kim, 2021).

Pentingnya *Defense Reform 2.0* tidak hanya terletak pada dimensi militer, melainkan juga pada dimensi politik-strategis. Reformasi ini dinilai sebagai instrumen untuk menjaga kredibilitas aliansi dengan Amerika Serikat melalui pembagian beban pertahanan yang lebih seimbang, sekaligus memperkuat kemandirian kemampuan militer Korea Selatan dalam jangka panjang (Bowers,

2020). Dengan meningkatnya ancaman nuklir Korea Utara pasca-2018 dan berbagai keterbatasan domestik yang dihadapi Seoul, evaluasi terhadap efektivitas *Defense Reform 2.0* menjadi krusial baik dari sisi pencapaian tujuan modernisasi pertahanan maupun kemampuannya merespons ancaman keamanan regional. Namun demikian, hingga kini masih terdapat kesenjangan penelitian mengenai sejauh mana reformasi ini berhasil menjawab tantangan nuklir Pyongyang secara efektif.

Menurut Kim (2022), selain implikasi eksternal, proses modernisasi pertahanan Korea Selatan melalui *Defense Reform 2.0* juga memengaruhi dinamika politik domestik. Program reformasi ini menjadi ajang kontestasi kepentingan antara pemerintah sipil yang berupaya meningkatkan akuntabilitas dan transparansi, versus kalangan militer yang masih memegang pengaruh kuat dalam pengambilan keputusan pertahanan. Ketegangan sipil–militer semacam itu berpotensi memengaruhi kecepatan dan konsistensi implementasi reformasi, misalnya dalam hal reorganisasi struktur komando atau distribusi anggaran modernisasi alutsista. Dengan kata lain, *Defense Reform 2.0* bukan hanya persoalan teknis militer semata, tetapi juga cermin dari dinamika politik internal yang kompleks dalam birokrasi pertahanan Korea Selatan.

Isu modernisasi pertahanan Korea Selatan tidak dapat dilepaskan dari konteks regional yang semakin kompleks dan *multipolar*. Meningkatnya kapabilitas nuklir dan misil Korea Utara bersamaan dengan kebangkitan kekuatan militer Tiongkok serta perubahan kebijakan keamanan Jepang menambah kerentanan lanskap keamanan Asia Timur (Bowers, 2020). Dalam situasi ini,

Korea Selatan dituntut untuk tidak hanya meningkatkan kapasitas pertahanannya secara mandiri, tetapi juga mengelola hubungan aliansi dan rivalitas regional secara hati-hati. *Defense Reform 2.0*, dengan segala keterbatasan dan potensinya, pada akhirnya menjadi instrumen strategis bagi Seoul untuk menjaga stabilitas sekaligus memperkuat posisi tawarnya di tengah dinamika keamanan kawasan yang kian bergejolak.

Penelitian ini berupaya menganalisis modernisasi sistem pertahanan Korea Selatan melalui *Defense Reform 2.0* pada periode 2018-2024 dalam merespons ancaman nuklir Korea Utara. Dengan memadukan perspektif teori modernisasi militer, teori keamanan dan *deterrence*, serta teori reformasi pertahanan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik sekaligus rekomendasi praktis bagi studi keamanan kawasan Asia Timur.

1.2 Batasan dan Rumusan Masalah

Fokus penelitian ini ada pada analisis kebijakan modernisasi sistem pertahanan Korea Selatan melalui *Defense Reform 2.0* dalam merespons ancaman nuklir Korea Utara pada periode 2018-2024. Fokus penelitian ini dibatasi pada tiga hal utama yaitu, Analisis mengenai kondisi geopolitik Semenanjung Korea pasca-2018 yang membentuk konteks meningkatnya ancaman keamanan, Identifikasi bentuk ancaman nuklir Korea Utara serta implikasinya terhadap keamanan regional Asia Timur setelah 2018, Pembahasan tentang isi dan implementasi *Defense Reform 2.0* sebagai strategi modernisasi pertahanan Korea Selatan, termasuk agenda restrukturisasi pasukan, modernisasi alutsista, dan efisiensi organisasi militer.

Melanjutkan pembatasan masalah, penelitian ini tidak mencakup analisis detail aspek teknis militer seperti spesifikasi senjata, teknologi persenjataan, maupun strategi operasional tempur yang bersifat rahasia. Penelitian juga tidak akan membandingkan secara mendalam *Defense Reform 2.0* dengan kebijakan pertahanan negara lain, melainkan tetap terpusat pada Korea Selatan sebagai studi kasus.

Berdasarkan batasan yang dipaparkan, rumusan masalah dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Bagaimana Kondisi Geopolitik Semenanjung Korea Pasca-2018 Yang Membentuk Konteks Ancaman Keamanan Bagi Korea Selatan?
2. Bagaimana Dan Sejauh Mana *Defense Reform 2.0* Berperan Sebagai Strategi Modernisasi Pertahanan Korea Selatan Dalam Merespons Ancaman Nuklir Korea Utara Pada Periode 2018–2024?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis kondisi geopolitik Semenanjung Korea pasca-2018 yang membentuk konteks ancaman keamanan bagi Korea Selatan.
2. Menguraikan dan menelaah implementasi *Defense Reform 2.0* sebagai strategi modernisasi sistem pertahanan Korea Selatan pada periode 2018–2024, sekaligus mengevaluasi efektivitasnya dalam merespons ancaman nuklir Korea Utara

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan menghasilkan kontribusi bagi pengembangan kajian hubungan internasional, khususnya dalam bidang studi keamanan dan modernisasi pertahanan. Hasil analisis dapat memperbanyak literatur mengenai dinamika kebijakan pertahanan di Asia Timur serta memperluas pemahaman tentang penerapan teori *deterrence* dan teori *Security Dilemma* dalam konteks kontemporer Korea Selatan.

1.4.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini juga bermanfaat secara praktis bagi pembuat kebijakan, akademisi, maupun masyarakat umum. Bagi pembuat kebijakan, hasil penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan pertahanan yang adaptif terhadap dinamika ancaman nuklir di Asia Timur. Bagi akademisi, penelitian ini memberi rujukan empiris untuk analisis kebijakan pertahanan Korea Selatan. Sedangkan bagi masyarakat, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman mengenai urgensi modernisasi pertahanan serta relevansinya dengan stabilitas keamanan kawasan pada periode 2018-2024.

1.5 Kerangka Konseptual

Penelitian ini berlandaskan pada pemahaman bahwa kebijakan pertahanan suatu negara dibentuk oleh interaksi antara faktor eksternal dan internal. Dalam konteks Korea Selatan, faktor eksternal utama adalah peningkatan ancaman nuklir Korea Utara pasca-2018, terutama melalui adopsi doktrin *pre-emptive nuclear*

strike dan intensifikasi uji coba rudal balistik jarak jauh. Sementara itu, faktor internal mencakup keterbatasan anggaran pertahanan, krisis demografi yang mengurangi jumlah personel wajib militer, serta ketegangan antara otoritas sipil dan militer dalam birokrasi pertahanan.

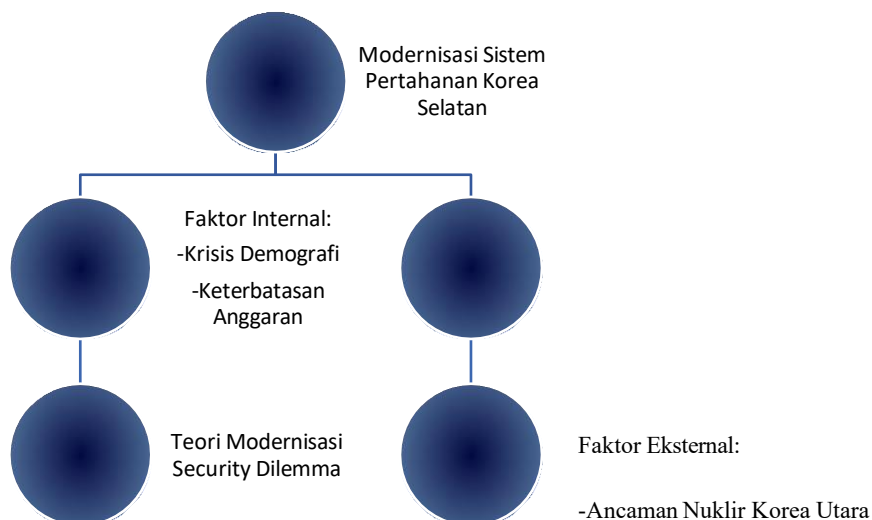
Kedua faktor tersebut menciptakan kebutuhan strategis bagi Korea Selatan untuk menyesuaikan struktur militernya melalui kebijakan modernisasi yang komprehensif. *Defense Reform 2.0*, yang diluncurkan pada tahun 2018, menjadi respon utama terhadap dinamika ancaman dan keterbatasan domestik tersebut. Analisis penelitian ini menggunakan dua teori utama *deterrence theory* dan *Security Dilemma theory* untuk menjelaskan hubungan antara ancaman eksternal dan kebijakan pertahanan yang diambil Seoul selama periode 2018-2024.

Teori *Deterrence* (pencegahan) digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara berupaya mencegah agresi lawan melalui ancaman balasan yang kredibel dan rasional. Inti teori ini adalah bahwa kekuatan militer dan janji balasan yang mahal untuk penyerang. Dalam konteks Korea Selatan, *deterrence* diimplementasikan melalui upaya memperkuat kapabilitas militer dan mempertahankan kredibilitas aliansi dengan Amerika Serikat. *Defense Reform 2.0* mencerminkan strategi nasional untuk memperkuat pencegahan tersebut melalui penataan ulang pasukan, modernisasi sistem persenjataan, dan peningkatan sistem pertahanan berlapis. Analisis dalam penelitian ini akan berfokus pada sejauh mana kebijakan tersebut berhasil meningkatkan efektivitas *deterrence* Korea Selatan terhadap ancaman nuklir Pyongyang.

Teori *Security Dilemma* menjelaskan paradoks keamanan antarnegara, di

mana tindakan defensif suatu negara sering kali dianggap ofensif oleh pihak lain. Menurut Jervis (1978), dilema keamanan muncul karena ketidakpastian niat antarnegara, sehingga langkah penguatan pertahanan dapat memicu reaksi serupa dari lawan dan memperburuk instabilitas. Dalam konteks Semenanjung Korea, modernisasi pertahanan Korea Selatan melalui *Defense Reform 2.0* ditujukan untuk memperkuat keamanan nasional, namun bagi Korea Utara langkah tersebut dapat dipersepsikan sebagai ancaman langsung terhadap stabilitas rezimnya. Hal ini kemudian memicu Pyongyang mempercepat program rudal dan memperluas doktrin nuklirnya menjadi *pre-emptive strike* pada 2022, yang justru memperkuat siklus perlombaan senjata di kawasan.

Bagan 1. Skema Teori dan Konsep



Sumber : Peneliti (2026)

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitik. Pendekatan ini dipilih karena fokus utama penelitian adalah menganalisis fenomena politik dan keamanan yang kompleks, yaitu modernisasi sistem pertahanan Korea Selatan melalui *Defense Reform 2.0* dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara pada periode reformasi yang dimulai 2018 hingga berakhirnya pemerintahan Moon Jae-in dan berlanjut ke awal pemerintahan berikutnya. Metode kualitatif memungkinkan peneliti memahami konteks kebijakan secara mendalam, sementara sifat deskriptif-analitik memungkinkan penyajian data secara sistematis sekaligus memberikan evaluasi kritis terhadap implementasi kebijakan tersebut.

1.6.2 Sumber Data

Penelitian ini sepenuhnya bergantung pada data sekunder, berupa jurnal ilmiah, artikel akademik, buku, laporan lembaga riset internasional (misalnya SIPRI, CRS, CSIS, IISS), maupun sumber berita kredibel seperti *The Diplomat*, *Yonhap News*, dan *Reuters*. Data dipilah berdasarkan relevansinya dengan isu keamanan Semenanjung Korea, kebijakan *Defense*

Reform 2.0, serta perkembangan program nuklir Korea Utara setelah tahun 2018.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri literatur akademik, dokumen resmi pemerintah Korea Selatan, laporan lembaga penelitian, serta arsip digital yang berhubungan dengan kebijakan pertahanan. Pemilihan literatur difokuskan pada periode implementasi *Defense Reform 2.0* agar analisis tetap terarah pada konteks kebijakan dan ancaman aktual yang berkembang sejak reformasi tersebut dimulai.

1.6.4 Teknik Analisis Data

Analisis dilakukan dengan metode analisis isi (*content analysis*). Data yang terkumpul dikelompokkan sesuai tema penelitian: dinamika geopolitik pasca-2018, intensifikasi ancaman nuklir Korea Utara, faktor domestik yang mendorong reformasi, serta implementasi *Defense Reform 2.0*. Selanjutnya, data dianalisis dengan menghubungkan kerangka teori modernisasi militer, teori keamanan dan *deterrence*, serta teori reformasi pertahanan. Pendekatan ini bertujuan menjawab sejauh mana *Defense Reform 2.0* berhasil meningkatkan kapabilitas pertahanan Korea Selatan dalam merespons ancaman nuklir yang semakin nyata.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

2.1 Teori

2.1.1 Teori Deterrence

Teori *deterrence* atau teori pencegahan merupakan salah satu konsep utama dalam studi keamanan internasional. Intinya, *deterrence* menjelaskan bagaimana suatu negara dapat mencegah tindakan agresi lawan dengan menciptakan ancaman pembalasan yang meyakinkan. Logikanya sederhana: jika lawan mempercayai bahwa serangan akan berujung pada konsekuensi yang mahal atau bahkan fatal, maka serangan tersebut kemungkinan besar akan ditunda atau dibatalkan (Choi, 2021). Oleh karena itu, *deterrence* sangat bergantung pada kredibilitas ancaman dan kesiapan untuk benar-benar menggunakannya bila diperlukan.

Dalam praktiknya, *deterrence* terbagi ke dalam dua bentuk utama. Pertama, *deterrence* konvensional yang bertumpu pada kekuatan militer tradisional, seperti modernisasi persenjataan, pengerahan pasukan, dan peningkatan kemampuan sistem pertahanan udara atau misil. Kedua, *deterrence* nuklir yang berbasis pada ancaman penggunaan senjata nuklir sebagai upaya pencegahan serangan lawan (Choi, 2021). Kedua bentuk *deterrence* ini saling terkait, karena efektivitas pencegahan sering kali ditentukan oleh kombinasi kekuatan konvensional dan ancaman nuklir.

Konteks Korea Selatan memberikan gambaran menarik mengenai penerapan *deterrence*. Sebagai negara yang berhadapan langsung dengan ancaman nuklir Korea Utara, Seoul mengembangkan strategi yang dikenal dengan tiga poros pertahanan: *Kill Chain* (sistem serangan pre-emptive untuk menghancurkan misil musuh sebelum diluncurkan), *Korea Air and Missile Defense* (KAMD, sistem pertahanan udara dan rudal berlapis), serta *Korea Massive Punishment and Retaliation* (KMPPR, strategi serangan balasan besar-besaran terhadap pusat kekuasaan Korea Utara). Tiga poros ini dirancang untuk menciptakan lapisan pencegahan berjenjang yang memadukan *deterrence* konvensional dan nuklir, meskipun dalam realitasnya Korea Selatan masih sangat bergantung pada *extended deterrence* dari Amerika Serikat (Choi, 2021).

Terdapat perdebatan akademik mengenai efektivitas strategi ini. Di antaranya kredibilitas payung nuklir Amerika Serikat menghadapi krisis, sebab Korea Selatan terlalu bergantung pada jaminan keamanan Washington tanpa membangun kapasitas mandiri yang memadai (Choi, 2021). Hal ini menimbulkan dilema karena kredibilitas *deterrence* bergantung bukan hanya pada kekuatan sekutu, tetapi juga pada kemampuan nasional untuk menanggung beban pertahanan. Dengan kata lain, tanpa kemandirian kapabilitas, *deterrence* Korea Selatan berisiko dipandang lemah oleh Pyongyang.

Third Nuclear Age, asumsi dasar dari *deterrence* klasik mulai dipertanyakan. Negara-negara seperti Korea Utara tidak selalu bertindak

rasional secara kalkulatif, melainkan kerap menggunakan strategi berani (risk-acceptant) untuk menunjukkan tekad politiknya (Morgan, 2023). Hal ini berarti bahwa ancaman pembalasan tidak selalu efektif mencegah agresi, karena lawan mungkin bersedia menerima risiko eskalasi. Dengan demikian, *deterrence* di Semenanjung Korea harus dipahami dalam konteks unik di mana kalkulasi strategis bercampur dengan faktor ideologis dan legitimasi rezim.

Dalam analisis yang lebih kontemporer, menekankan pentingnya kombinasi antara kapabilitas militer nasional dan sinyal strategis yang jelas. keberhasilan *deterrence* tidak hanya ditentukan oleh jumlah atau kecanggihan persenjataan, tetapi juga oleh bagaimana sebuah negara mengirim pesan konsisten kepada lawannya (Ivre, 2025). Jika sinyal ambigu atau dianggap tidak kredibel, maka *deterrence* bisa gagal walaupun secara militer negara tersebut cukup kuat. Dalam konteks ini, *Defense Reform 2.0* Korea Selatan dapat dipandang sebagai manifestasi upaya membangun *deterrence* yang lebih kredibel, bukan hanya bergantung pada AS, melainkan dengan memperkuat kemampuan mandiri melalui modernisasi alutsista, restrukturisasi pasukan, dan integrasi teknologi canggih.

Dengan demikian, teori *deterrence* sangat relevan untuk menjelaskan strategi pertahanan Korea Selatan pasca-2018. Reformasi ini bukan hanya soal memperkuat militer secara teknis, tetapi juga upaya menciptakan ancaman pembalasan yang cukup meyakinkan agar Korea Utara mengurungkan agresinya. Dalam hal ini, *Defense Reform 2.0* menjadi kerangka strategis yang berfungsi sebagai jawaban langsung terhadap intensifikasi ancaman nuklir

Pyongyang.

Dalam perkembangan studi keamanan internasional, konsep deterrence tidak lagi dipahami secara sempit sebagai pencegahan yang hanya bergantung pada kepemilikan senjata nuklir. Deterrence kontemporer berkembang seiring dengan perubahan karakter ancaman, aktor, dan kemajuan teknologi militer. Ancaman nuklir modern tidak selalu dihadapi melalui simetri kapabilitas, melainkan melalui kombinasi kekuatan konvensional presisi, sistem pertahanan berlapis, serta kemampuan respons cepat. Perubahan ini menunjukkan bahwa efektivitas deterrence lebih ditentukan oleh kredibilitas respons dibandingkan besarnya daya hancur senjata. Negara-negara non-nuklir juga memiliki ruang strategis untuk membangun deterrence yang efektif. Dalam konteks ini, deterrence menjadi instrumen yang fleksibel dan adaptif. Pendekatan tersebut relevan dalam lingkungan keamanan yang semakin kompleks dan dinamis.

Deterrence modern juga tidak lagi berdiri semata-mata pada dimensi militer. Banyak ahli menekankan bahwa deterrence bersifat multidimensional dan melibatkan faktor politik, psikologis, teknologi, serta komunikasi strategis. Keberhasilan deterrence sangat dipengaruhi oleh bagaimana ancaman dipersepsikan oleh lawan. Persepsi tersebut terbentuk melalui sinyal kebijakan, konsistensi tindakan, dan kredibilitas komitmen pertahanan. Dalam lingkungan keamanan yang sarat ketidakpastian, kegagalan komunikasi dapat melemahkan efek pencegahan. Oleh karena itu, deterrence membutuhkan koordinasi lintas instrumen kekuatan nasional. Hal ini menuntut perencanaan pertahanan yang komprehensif dan berkelanjutan.

Selain itu, deterrence kontemporer semakin dipengaruhi oleh perkembangan teknologi militer. Kemajuan dalam sistem pengintaian, senjata presisi, dan pertahanan udara mengubah cara negara membangun efek pencegahan. Negara tidak lagi hanya mengandalkan ancaman balasan besar, tetapi juga kemampuan respons cepat dan terukur. Kemampuan tersebut memungkinkan negara merespons ancaman secara proporsional. Dalam konteks ini, deterrence tidak selalu berarti eskalasi. Sebaliknya, deterrence dapat berfungsi sebagai alat pengelolaan konflik. Pendekatan ini menekankan kontrol risiko daripada dominasi militer.

Dalam konteks Semenanjung Korea, deterrence menghadapi tantangan unik akibat karakter kepemimpinan Korea Utara yang sulit diprediksi. Ancaman nuklir Korea Utara tidak selalu disampaikan melalui doktrin resmi atau pernyataan kebijakan yang jelas. Sebaliknya, ancaman sering diwujudkan melalui uji coba misil dan demonstrasi kekuatan militer. Pola ini meningkatkan ketidakpastian strategis bagi Korea Selatan. Ketidakpastian tersebut mempersempit ruang peringatan dini dan respons. Oleh karena itu, deterrence berbasis teknologi dan kesiapan operasional menjadi sangat penting. Pendekatan ini memungkinkan Korea Selatan mengantisipasi berbagai skenario eskalasi.

Deterrence konvensional berbasis teknologi menjadi salah satu opsi realistis bagi Korea Selatan sebagai negara non-nuklir. Pendekatan ini memungkinkan peningkatan kemampuan pencegahan tanpa melanggar komitmen internasional terkait non-proliferasi. Dengan mengembangkan sistem

pertahanan berlapis dan senjata presisi, Korea Selatan dapat menciptakan ancaman balasan yang kredibel. Ancaman tersebut dirancang untuk memengaruhi kalkulasi strategis Korea Utara. Dalam konteks ini, deterrence tidak bersifat absolut, tetapi bersifat relatif dan situasional. Efektivitasnya bergantung pada konsistensi kebijakan dan kesiapan institusional. Oleh karena itu, deterrence kontemporer menjadi kerangka penting dalam penelitian ini.

Asymmetric deterrence merujuk pada upaya pencegahan yang dibangun melalui ketidaksimetrian kapabilitas antara dua aktor. Dalam pendekatan ini, negara yang menghadapi keterbatasan tertentu tidak berupaya meniru kekuatan lawan secara langsung. Sebaliknya, negara tersebut mengembangkan kapabilitas alternatif yang mampu menimbulkan biaya strategis bagi lawan. Pendekatan ini sering digunakan oleh negara non-nuklir yang menghadapi ancaman nuklir. Asymmetric deterrence memungkinkan fleksibilitas dalam perumusan strategi pertahanan. Negara dapat menyesuaikan respons dengan sumber daya yang dimiliki. Konsep ini menjadi semakin relevan dalam keamanan kontemporer.

Dalam praktiknya, asymmetric deterrence menekankan pada pemanfaatan keunggulan teknologi dan kecepatan respons. Negara non-nuklir dapat membangun deterrence melalui senjata presisi, sistem pertahanan udara, dan kemampuan pengintaian canggih. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pencegahan tidak harus bersifat simetris. Ancaman balasan yang efektif dapat dibangun melalui kombinasi kapabilitas yang berbeda. Dengan demikian, deterrence tidak hanya bergantung pada jenis senjata, tetapi pada efek strategis

yang ditimbulkan. Pendekatan ini memberikan ruang manuver bagi negara dengan keterbatasan tertentu. Asymmetric deterrence menjadi solusi rasional dalam konteks tersebut.

Dalam konteks Korea Selatan, asymmetric deterrence diwujudkan melalui modernisasi sistem senjata konvensional dan pertahanan berlapis. Korea Selatan tidak mengembangkan senjata nuklir sebagai respons terhadap Korea Utara. Sebaliknya, negara ini memilih jalur penguatan teknologi pertahanan dan kemampuan serangan presisi. Pilihan ini mencerminkan pemahaman bahwa pencegahan dapat dicapai tanpa eskalasi nuklir. Ancaman balasan dibangun melalui kemampuan untuk menargetkan aset strategis lawan secara presisi. Dengan demikian, asymmetric deterrence menjadi alternatif yang kredibel dan berkelanjutan. Pendekatan ini juga selaras dengan norma internasional.

Asymmetric deterrence juga memiliki dimensi psikologis yang signifikan. Ancaman balasan yang tidak sepenuhnya dapat diprediksi dapat memengaruhi kalkulasi risiko lawan. Ketidakpastian mengenai bentuk dan waktu respons dapat meningkatkan kehati-hatian pihak lawan. Dalam menghadapi Korea Utara yang sering menggunakan ambiguitas strategis, pendekatan ini menjadi relevan. Korea Selatan berupaya menciptakan ketidakpastian yang terkontrol. Namun, ketidakpastian tersebut juga membawa risiko salah tafsir. Oleh karena itu, pengelolaan asymmetric deterrence memerlukan keseimbangan yang cermat.

Selain manfaatnya, asymmetric deterrence juga memiliki keterbatasan.

Pendekatan ini sangat bergantung pada keandalan teknologi dan kesiapan operasional. Kegagalan sistem atau kesalahan persepsi dapat melemahkan efek deterrence. Selain itu, asymmetric deterrence dapat memicu respons adaptif dari lawan. Lawan dapat mengembangkan strategi baru untuk mengatasi ketidaksimetrian tersebut. Oleh karena itu, asymmetric deterrence harus dipahami sebagai proses dinamis. Pendekatan ini memerlukan evaluasi dan penyesuaian berkelanjutan. Hal ini memperkuat relevansinya dalam penelitian ini.

2.1.2 Teori Security Dilemma

Teori *Security Dilemma* merupakan konsep klasik dalam hubungan internasional yang menjelaskan paradoks keamanan antarnegara. Ketika satu negara memperkuat pertahanannya dengan tujuan meningkatkan keamanan, negara lain dapat menafsirkan langkah tersebut sebagai ancaman ofensif (Eyina & Anyalebechi, 2024). Reaksi lawan yang kemudian ikut memperkuat militernya justru menciptakan lingkaran ketidakamanan, yang sering kali berujung pada perlombaan senjata dan meningkatnya risiko konflik. Dengan demikian, *Security Dilemma* merupakan produk dari ketidakpastian intensi dan persepsi antarnegara.

Dalam konteks Semenanjung Korea, *Security Dilemma* tampak jelas. Upaya Korea Selatan melakukan reformasi militer dan modernisasi alutsista melalui *Defense Reform 2.0* dimaksudkan sebagai langkah defensif untuk melindungi diri dari ancaman nuklir Pyongyang. Namun, bagi Korea Utara, langkah ini justru ditafsirkan sebagai strategi ofensif dan bahkan persiapan

untuk serangan pre-emptive (Eyina & Anyalebechi, 2024). Interpretasi semacam ini mendorong Pyongyang untuk mempercepat program misilnya serta pada tahun 2022 melegalkan doktrin pre-emptive nuclear strike. Dengan kata lain, niat defensif Seoul justru menghasilkan efek kontraproduktif berupa peningkatan ancaman dari pihak lawan.

Hal ini menunjukkan bahwa reformasi pertahanan Korea Selatan memperkuat persepsi ancaman di pihak Korea Utara. Rezim Kim Jong-un kemudian memanfaatkan hal ini untuk memperkuat legitimasi domestik dan melanjutkan program nuklirnya dengan dalih mempertahankan diri dari provokasi eksternal (Eyina & Anyalebechi, 2024). Artinya, *Security Dilemma* di Semenanjung Korea tidak hanya berwujud militerisasi, tetapi juga memainkan peran dalam retorika politik dan propaganda domestik Korea Utara.

Strategi *counterforce* Korea Selatan, yaitu kemampuan untuk menyerang fasilitas nuklir dan misil Korea Utara secara presisi sebelum digunakan. Walaupun secara militer strategi ini dapat meningkatkan rasa aman Seoul, namun justru berpotensi memperbesar risiko instabilitas (Hiim & Bowers, 2020). Korea Utara yang mengetahui adanya ancaman pre-emptive bisa terdorong melakukan serangan mendahului (*use it or lose it*), sehingga mempercepat eskalasi konflik. Hal ini menciptakan dilema: semakin kuat pertahanan Korea Selatan, semakin tinggi pula risiko Korea Utara mengambil langkah ekstrem lebih awal.

Pergeseran Korea Utara ke doktrin nuklir ofensif pada 2022 tidak bisa

dilepaskan dari faktor eksternal, termasuk modernisasi pertahanan Korea Selatan. Pyongyang menilai bahwa perubahan keseimbangan militer akibat reformasi Seoul menuntut respons strategis berupa peningkatan kapabilitas nuklir. Hal ini memperlihatkan bahwa modernisasi pertahanan, meski dimaksudkan untuk meningkatkan keamanan nasional, justru menjadi bagian dari dinamika action-reaction yang memperburuk keamanan regional (Park, 2025).

Oleh karena itu, teori *Security Dilemma* menjadi kerangka yang tepat untuk memahami paradoks strategis yang dihadapi Korea Selatan. Di satu sisi, *Defense Reform 2.0* memperkuat pertahanan nasional, tetapi di sisi lain, reformasi ini turut memperkuat persepsi ancaman yang justru memicu eskalasi di Semenanjung Korea.

Untuk memperkuat landasan teoritis yang telah dijelaskan sebelumnya, penelitian ini juga merujuk pada pandangan beberapa ahli dalam studi keamanan dan pertahanan. Dalam konteks deterrence, Schelling (1966) menegaskan bahwa keberhasilan deterrence tidak terletak pada penggunaan kekuatan militer secara aktual, melainkan pada kemampuan negara untuk menciptakan persepsi ancaman balasan yang kredibel di mata lawan. Dengan kata lain, deterrence bekerja pada ranah psikologis dan kalkulasi strategis, bukan semata-mata pada superioritas kekuatan fisik.

Pandangan ini diperkuat oleh Freedman (2004) yang menyatakan bahwa deterrence dalam konteks kontemporer mengalami transformasi seiring berubahnya karakter ancaman. Ancaman nuklir modern tidak selalu dihadapi

oleh aktor rasional dalam kerangka klasik, sehingga strategi deterrence harus disertai dengan adaptasi kebijakan pertahanan dan kesiapan menghadapi skenario eskalasi terbatas. Dalam konteks ini, reformasi pertahanan menjadi instrumen penting untuk menjaga kredibilitas deterrence.

Sementara itu, konsep security dilemma yang dikemukakan oleh Herz (1950) menjelaskan bahwa upaya suatu negara untuk meningkatkan keamanan nasionalnya dapat menimbulkan rasa tidak aman bagi negara lain. Jervis (1978) kemudian menambahkan bahwa dilema keamanan diperkuat oleh faktor persepsi dan mispersepsi antaraktor, sehingga kebijakan yang bersifat defensif dapat ditafsirkan sebagai langkah ofensif. Konsep ini relevan untuk memahami bagaimana kebijakan pertahanan Korea Selatan berpotensi memengaruhi respons strategis Korea Utara

Security dilemma dalam konteks keamanan modern tidak hanya dipicu oleh peningkatan jumlah senjata. Perkembangan teknologi militer turut memperumit dinamika dilema keamanan. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan kemampuan ofensif dan defensif secara bersamaan. Dalam kondisi ini, sulit bagi aktor lain untuk membedakan niat defensif dan ofensif suatu kebijakan pertahanan. Modernisasi militer yang bertujuan defensif dapat dengan mudah dipersepsikan sebagai ancaman. Persepsi tersebut memperkuat dilema keamanan. Fenomena ini semakin menonjol dalam lingkungan berteknologi tinggi.

Dalam konteks Semenanjung Korea, modernisasi pertahanan Korea Selatan melalui Defense Reform 2.0 berpotensi memperdalam security

dilemma. Pengembangan sistem deteksi dini, pertahanan udara, dan serangan presisi dapat ditafsirkan Korea Utara sebagai persiapan ofensif. Persepsi ini mendorong respons balasan berupa pengembangan senjata nuklir yang lebih beragam. Dengan demikian, langkah defensif Korea Selatan dapat memicu spiral ketidakamanan. Kondisi ini menunjukkan bahwa niat defensif tidak selalu diterima sebagaimana dimaksud. Security dilemma menjadi semakin kompleks dan sulit dikelola.

Penelitian ini menunjukkan bahwa security dilemma bersifat struktural dalam sistem internasional yang ditandai oleh ketidakpercayaan. Dalam kondisi tersebut, setiap peningkatan kapabilitas militer berpotensi memicu respons balasan. Bahkan kebijakan yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dapat menghasilkan efek sebaliknya. Hal ini menegaskan bahwa dilema keamanan tidak selalu dapat dihindari. Namun, pemahaman terhadap mekanismenya dapat membantu mengelola risikonya. Oleh karena itu, teori security dilemma tetap relevan dalam analisis keamanan kontemporer. Kerangka ini membantu menjelaskan dinamika aksi–reaksi.

Meskipun demikian, security dilemma tidak bersifat deterministik. Beberapa pendekatan menekankan bahwa dilema keamanan dapat dikelola melalui transparansi dan komunikasi strategis. Mekanisme kepercayaan dan dialog keamanan dapat mengurangi risiko salah persepsi. Dalam konteks ini, kebijakan pertahanan perlu diimbangi dengan upaya diplomasi. Tanpa keseimbangan tersebut, modernisasi militer berisiko meningkatkan eskalasi. Oleh karena itu, pemahaman tentang security dilemma menjadi penting dalam

menilai Defense Reform 2.0. Teori ini melengkapi analisis deterrence.

Lingkungan keamanan berteknologi tinggi juga menciptakan tantangan baru dalam pengelolaan security dilemma. Sistem berbasis kecerdasan buatan dan otomatisasi meningkatkan kecepatan pengambilan keputusan. Kecepatan tersebut dapat mengurangi ruang untuk de-eskalasi. Dalam situasi krisis, kesalahan teknis atau interpretasi dapat berdampak besar. Oleh karena itu, dilema keamanan menjadi semakin sensitif terhadap faktor teknologi. Kondisi ini memperkuat urgensi analisis teoretis dalam penelitian ini. Security dilemma memberikan lensa penting untuk memahami implikasi jangka panjang modernisasi pertahanan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai strategi pertahanan Korea Selatan dalam menghadapi ancaman nuklir Korea Utara berkembang pesat setelah tahun 2018, ketika Pyongyang mempercepat program nuklir dan mengubah doktrin militernya menjadi lebih ofensif. Fokus utama berbagai studi adalah dinamika eskalasi nuklir, efektivitas strategi *deterrence*, serta upaya modernisasi pertahanan Seoul sebagai respons terhadap perubahan lingkungan strategis. Kajian-kajian tersebut umumnya menyoroti bagaimana *Defense Reform 2.0* menjadi fondasi kebijakan modernisasi militer yang ditujukan untuk memperkuat kemandirian pertahanan dan meningkatkan kesiapan menghadapi ancaman nuklir di kawasan.

Lee Han Geun (2021) serta Pollack dan Kim (2020) menelaah bagaimana interaksi strategi nuklir dan konvensional Korea Utara berdampak terhadap postur

pertahanan Korea Selatan. Mereka menemukan bahwa kombinasi ancaman rudal dan nuklir mendorong Seoul mengadopsi sistem tiga poros pertahanan *Kill Chain*, KAMD, dan KMPR sebagai bentuk pencegahan berlapis yang memadukan kemampuan serangan dini dan pertahanan udara. Kajian tersebut juga menyoroti ketergantungan Korea Selatan terhadap *extended deterrence* dari Amerika Serikat yang menciptakan dilema strategis karena kredibilitas payung nuklir Washington semakin diragukan. Oleh sebab itu, penguatan pertahanan mandiri melalui *Defense Reform 2.0* dianggap sebagai langkah penting untuk menyeimbangkan aliansi dan otonomi militer.

Petersson Ivre (2025) dan Kim Inwoo (2022) menekankan dimensi kelembagaan dalam reformasi pertahanan Korea Selatan. Ivre menyoroti pergeseran kebijakan pertahanan dari ketergantungan eksternal menuju *self-reliant deterrence* melalui investasi teknologi dan peningkatan efisiensi organisasi militer. Kim, di sisi lain, menyoroti kendala internal berupa dominasi militer dalam birokrasi pertahanan yang sering memperlambat implementasi reformasi. Kedua penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan *Defense Reform 2.0* sangat bergantung pada kemampuan pemerintah mengelola hubungan sipil–militer dan membangun tata kelola pertahanan yang lebih transparan serta profesional.

Bowers (2020) dan Park (2025) memberikan kontribusi penting dalam memahami aspek strategis reformasi. Bowers membahas dilema *counterforce strategy*, yakni potensi instabilitas yang muncul bila Korea Selatan meningkatkan kemampuan serangan presisi terhadap fasilitas nuklir Korea Utara. Park memperluas analisis dengan menegaskan bahwa perubahan doktrin nuklir

Pyongyang menjadi *first-strike capability* memperkuat urgensi *Defense Reform 2.0* untuk memastikan kesiapan dan kredibilitas pertahanan nasional. Kedua studi tersebut menegaskan bahwa modernisasi militer Korea Selatan bukan sekadar reaksi taktis, tetapi transformasi strategis untuk mempertahankan stabilitas kawasan.

Aspek ekonomi dan demografis reformasi dibahas oleh Kim Kyeong-Gun (2021), Jang dan Park (2024), serta Sim (2023). Kim dan Jang menyoroti pergeseran paradigma dari *quantity-based defense* menuju *quality-based defense*, di mana efisiensi anggaran dan penguatan industri pertahanan menjadi prioritas utama. Mereka menyoroti kebijakan *rapid acquisition* yang mempercepat pengadaan teknologi baru dan memperkuat daya saing ekspor senjata Korea Selatan. Sementara itu, Sim menekankan pengaruh krisis demografi terhadap penurunan jumlah personel militer yang mendorong profesionalisasi dan digitalisasi pertahanan. Ketiganya menegaskan bahwa *Defense Reform 2.0* tidak hanya bersifat strategis, tetapi juga merupakan jawaban terhadap tekanan struktural domestik.

Kesenjangan utama dari penelitian-penelitian terdahulu adalah ketiadaan kajian empiris yang secara langsung menilai efektivitas *Defense Reform 2.0* dalam meningkatkan kapasitas *deterrence* Korea Selatan. Sebagian besar studi berfokus pada dimensi eksternal seperti ancaman nuklir Korea Utara atau dinamika politik kawasan, namun belum menelaah secara komprehensif sejauh mana reformasi ini berhasil memperkuat struktur pertahanan, modernisasi alutsista, dan kesiapan teknologi militer nasional. Penelitian ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut

dengan menganalisis implementasi *Defense Reform 2.0* secara empiris, menilai dampaknya terhadap kapabilitas pertahanan Korea Selatan, dan mengevaluasi efektivitasnya dalam menghadapi ancaman nuklir yang semakin kompleks.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas isu ancaman nuklir Korea Utara dan kebijakan pertahanan Korea Selatan dari berbagai perspektif. Beberapa studi menitikberatkan pada peran aliansi Amerika Serikat Korea Selatan dalam menjaga stabilitas keamanan, sementara penelitian lainnya fokus pada aspek teknis sistem pertahanan dan modernisasi militer Korea Selatan.

Namun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu cenderung membahas isu tersebut secara parsial, baik dari sudut pandang teknis pertahanan, kebijakan luar negeri, maupun dinamika aliansi. Penelitian-penelitian tersebut belum secara khusus menempatkan *Defense Reform 2.0* sebagai objek analisis utama yang dikaji secara komprehensif dalam kerangka teori deterrence dan security dilemma secara bersamaan.

Oleh karena itu, penelitian ini memiliki perbedaan mendasar dengan studi sebelumnya. Penelitian ini tidak hanya mengkaji reformasi pertahanan Korea Selatan sebagai kebijakan militer semata, tetapi menganalisisnya sebagai respons strategis terhadap ancaman nuklir Korea Utara yang memiliki implikasi langsung terhadap dinamika keamanan kawasan Asia Timur. Dengan mengombinasikan teori deterrence dan security dilemma, penelitian ini berupaya memberikan pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai tujuan, efektivitas, serta konsekuensi strategis dari *Defense Reform 2.0*.

Tinjauan terhadap penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kajian

keamanan Semenanjung Korea didominasi oleh analisis terhadap program nuklir Korea Utara. Banyak penelitian juga menekankan peran aliansi Amerika Serikat–Korea Selatan dalam menjaga stabilitas kawasan. Kajian-kajian tersebut memberikan kontribusi penting terhadap pemahaman dinamika keamanan regional. Namun, fokus yang kuat pada aspek nuklir dan aliansi sering kali mengabaikan kebijakan pertahanan domestik Korea Selatan. Reformasi pertahanan cenderung diperlakukan sebagai variabel sekunder. Padahal, kebijakan tersebut memiliki dampak strategis yang signifikan.

Penelitian ini menempati posisi yang berbeda dengan menempatkan Defense Reform 2.0 sebagai objek analisis utama. Fokus penelitian diarahkan pada modernisasi pertahanan Korea Selatan sebagai respons terhadap ancaman nuklir Korea Utara. Pendekatan ini memungkinkan analisis yang lebih menyeluruh terhadap dinamika keamanan. Berbeda dari penelitian sebelumnya, studi ini tidak memisahkan antara aspek ancaman dan respons kebijakan. Kedua aspek dianalisis secara simultan. Dengan demikian, penelitian ini memberikan perspektif yang lebih integratif. Pendekatan ini memperkaya kajian keamanan internasional.

Keunikan penelitian ini juga terletak pada penggunaan kerangka teori deterrence dan security dilemma secara bersamaan. Banyak penelitian terdahulu cenderung menggunakan salah satu kerangka secara terpisah. Penggunaan kedua teori secara simultan memungkinkan analisis yang lebih seimbang. Deterrence menjelaskan tujuan kebijakan, sementara security dilemma menjelaskan konsekuensi tidak langsungnya. Kombinasi ini jarang diterapkan secara eksplisit

dalam studi sebelumnya. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi celah teoretis yang ada. Kontribusi ini bersifat konseptual dan empiris.

Selain itu, penelitian ini membatasi periode analisis pada pasca-2018. Periode ini ditandai oleh perubahan signifikan dalam pola ancaman dan kebijakan pertahanan. Dengan fokus periode yang jelas, analisis dapat dilakukan secara lebih mendalam dan kontekstual. Penelitian ini tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis. Data empiris digunakan untuk mendukung argumentasi teoretis. Oleh karena itu, kontribusi penelitian ini relevan bagi pengembangan studi keamanan. Posisi penelitian ini memperkaya literatur yang ada.

Secara keseluruhan, penelitian ini menawarkan perspektif baru dalam kajian keamanan Semenanjung Korea. Dengan menempatkan Defense Reform 2.0 sebagai pusat analisis, penelitian ini menyoroti pentingnya kebijakan pertahanan domestik dalam dinamika keamanan regional. Pendekatan ini memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang hubungan antara ancaman dan respons. Selain itu, penelitian ini menegaskan relevansi teori keamanan klasik dalam konteks kontemporer. Dengan demikian, posisi penelitian ini jelas dan memiliki kontribusi akademik. Hal ini memperkuat legitimasi penelitian dalam kajian keamanan internasional.

2.3 Kerangka Berpikir Penelitian

Penelitian ini berangkat dari asumsi bahwa dinamika keamanan regional di Semenanjung Korea dipengaruhi secara signifikan oleh ancaman eksternal, khususnya program nuklir Korea Utara yang menunjukkan eskalasi tajam sejak

tahun 2018. Eskalasi tersebut ditandai oleh peningkatan jumlah uji coba rudal balistik antarbenua (ICBM), pengembangan hulu ledak miniatur untuk rudal jarak menengah, serta revisi doktrin militer menuju strategi *pre-emptive nuclear strike* (Park, 2025; Cho & Petrovics, 2022). Perubahan ini mencerminkan upaya Pyongyang untuk memperkuat posisi tawar strategisnya dan menegaskan kemampuan *assured retaliation* terhadap ancaman eksternal, khususnya Amerika Serikat dan sekutunya. Selain dimensi militer, ancaman tersebut juga bersifat politis dan psikologis karena berimplikasi langsung pada kredibilitas *deterrence* Korea Selatan dan stabilitas kawasan Asia Timur (Kim, 2024). Oleh karena itu, penelitian ini memandang bahwa ancaman nuklir Korea Utara tidak hanya menjadi isu keamanan tradisional, tetapi juga tantangan struktural yang menuntut respons kebijakan yang komprehensif, adaptif, dan berorientasi jangka panjang.

Dalam menghadapi tantangan yang kompleks tersebut, respons kebijakan Korea Selatan tidak terbatas pada diplomasi atau penguatan kerja sama strategis dengan Amerika Serikat melalui *extended deterrence*, tetapi juga diwujudkan melalui reformasi internal yang sistematis. Salah satu langkah paling signifikan adalah *Defense Reform 2.0*, sebuah inisiatif strategis nasional yang diluncurkan pada 2019 di bawah pemerintahan Presiden Moon Jae-in. Reformasi ini bertujuan untuk membangun kekuatan militer yang lebih lincah, profesional, efisien, dan berbasis teknologi tinggi. Fokus utamanya mencakup pengurangan jumlah personel aktif dari sekitar 600 ribu menjadi 500 ribu, peningkatan kemampuan siber dan ruang angkasa, serta integrasi sistem pertahanan otomatis berbasis kecerdasan buatan (AI) dalam komando dan pengendalian militer (Springer, 2024;

Jang & Park, 2024). Kebijakan ini sekaligus menandai pergeseran paradigma pertahanan Korea Selatan dari *quantity-based defense* menuju *quality-based defense* yang menekankan kesiapan teknologi dan interoperabilitas antar-matra. *Defense Reform 2.0* juga mencerminkan orientasi baru kebijakan pertahanan Korea Selatan yang tidak hanya berfokus pada penguatan militer konvensional, tetapi juga pada efisiensi organisasi dan kemampuan mandiri menghadapi ancaman nuklir yang terus berkembang.

Efektivitas reformasi ini, bagaimanapun, tidak dapat dilepaskan dari sejumlah faktor internal yang menentukan arah implementasinya. Pertama, aspek demografi menjadi tantangan struktural yang signifikan. Penurunan angka kelahiran dan penyusutan populasi usia produktif telah mengurangi ketersediaan personel wajib militer secara drastis. Lee (2021) mencatat bahwa jumlah pria berusia 20 tahun di Korea Selatan diperkirakan menurun hampir separuh antara 2020 dan 2065, sehingga sistem pertahanan berbasis wajib militer tidak lagi berkelanjutan. Kedua, aspek anggaran pertahanan menjadi variabel krusial dalam keberlanjutan *Defense Reform 2.0*. Pollack dan Kim (2020) menunjukkan bahwa modernisasi sistem senjata strategis menuntut kesinambungan fiskal yang stabil, sementara proporsi anggaran pertahanan terhadap total belanja negara justru menurun. Ketidakseimbangan ini menuntut strategi efisiensi melalui prioritas investasi dan optimalisasi teknologi. Ketiga, aspek hubungan sipil– militer memainkan peran penting dalam efektivitas kebijakan reformasi. Petersson Ivre (2025) menekankan bahwa implementasi reformasi pertahanan sangat dipengaruhi oleh interaksi antara elite politik sipil, Kementerian Pertahanan, dan

jajaran militer. Ketegangan antara upaya pemerintah sipil memperluas akuntabilitas dengan dominasi tradisional militer dalam perumusan kebijakan kerap menciptakan friksi birokratis yang memperlambat realisasi reformasi secara menyeluruh.

Hubungan antara ketiga komponen utama ancaman eksternal, faktor internal, dan respons kebijakan membentuk struktur logis yang menjadi dasar analisis penelitian ini. Ancaman eksternal dari Korea Utara bertindak sebagai pemicu utama yang menciptakan kebutuhan strategis untuk memperkuat sistem pertahanan nasional. Ketika ancaman ini dikombinasikan dengan keterbatasan internal seperti menurunnya tenaga militer, keterbatasan fiskal, serta kompleksitas hubungan sipil militer, maka muncul urgensi bagi Seoul untuk melakukan restrukturisasi menyeluruh terhadap institusi pertahanannya. *Defense Reform 2.0* menjadi bentuk konkret dari respons struktural yang menghubungkan variabel eksternal dan internal tersebut. Penelitian ini akan mengeksplorasi bagaimana kebijakan tersebut dirancang, diimplementasikan, dan dievaluasi dalam konteks ancaman strategis yang terus berubah, serta menilai apakah reformasi ini cukup adaptif untuk memperkuat kredibilitas *deterrence* Korea Selatan terhadap ancaman nuklir Korea Utara. Dengan demikian, hubungan konseptual dalam penelitian ini mencerminkan logika kausal yang berawal dari ancaman (penyebab eksternal), diperkuat oleh kondisi domestik (faktor internal), dan menghasilkan kebijakan pertahanan yang menjadi objek analisis utama penelitian.

